

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief Muljadi, 2006. *Landasan Dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rafa Grafindo Persada.

Damas Dwi Anggoro, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.

I Gde Pitana, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Imam Soebechi, 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jum Angraini, 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grahara Ilmu,.

Manullang, 1981. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maringan Masry Simbolon, 2004. *Dasar- Dasar Adminsitrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Margono, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammd Djafar S, 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Rajarasindo Persada.

Marihot P Siahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muh. Hizbul Muflihin, 2015. *Administrasi Pendidikan*, Klaten Utara: Cv Gema Nusa.



M. Liga Suryadana, Vanny Octavia, 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Bandung: Alfabeta.

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru* Yogyakarta: Andi Offset.

Pendit, Nyoman, 2002. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramiata.

Ridwan HR., 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

S. Prajudi Admosudirdjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarwoto, 2001. *Teori Tehnik Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirawan B. Ilyas, 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali

Yuslim, 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yudi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo dan Imam Ropi, 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Perda No.4/2014, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Perda No.1/2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Perda No. 2/2018 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Pesisir Selatan.

Perbup No.31/2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Perbup No.169/2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Perbup No.179/2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Jurnal dan Website

Arif Wahyu Isnaini,. “Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulung agung”.*Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2014.

Ivan Fauzani Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inovatif Vol VII No.II Mei 2014*.

Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. *Jurnal Media Hukum Vol.23, No.2., hlm.188. 2016*.

Analisis Peranan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika, *Jurnal Kritis Vol. III No. 1 Edisi April 2019*.

http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/download/169/pdf_13

(diakses tanggal 09/06/2022, pukul 21:15 WIB)

<https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sector-pariwisata>, (diakses

tanggal 10/06/2022, pukul 22:15 WIB)

<https://kbbi.web.id/pariwisata>(diakses tanggal 23/ 08/ 2022, pukul 15:20 WIB)

<https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/4923/realisasi-pad-retribusi-pariwisata-pessel-capai-52-persen.html> (diakses pada tanggal 09/10/2022, pukul 16:20 WIB)

<https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/bupati-rusma-yul-anwar--apresiasi-pad-kabupaten-pesisir-selatan-tahun-2022-capai-105-persen-> (diakses pada tanggal 09/10/2022, pukul 16:20 WIB)

<https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/kadis-pariwisata-pemuda-dan-olahraga-suhendri---lebaran-1443-h-sektor-pariwisata-sumbangkan-pad-2825>

(diakses pada tanggal 07/12/2022, pukul 15.30 WIB)